



Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015

Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB B/21/D.I.PANRB-UPRBN/12/2015

Setyanta Nugraha
Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI



Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2015 adalah 65,99 atau Kategori “B”

Evaluasi PMPRB adalah Menilai kemajuan dan memberikan saran perbaikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan meningkatkan kualitas pelayanan public.



Nilai Pengungkit

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	% Capaian
A	Pengungkit				
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,08	3,92	78,30
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,88	2,29	45,75
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	3,84	64,04
4	Penataan Tata Laksana	5,00	3,34	3,60	71,90
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	5,07	11,65	77,69
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,65	3,33	55,53
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,12	6,18	51,52
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,96	2,96	49,36
		60,00	26,92	37,77	62,95



Nilai Hasil

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	% Capaian
B	Hasil				
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	8,56	12,40	69,57
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	3,00	8,07	55,00
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	0,00	7,75	80,00
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	11,56	28,22	68,53
	Indeks Reformasi Birokrasi	100.00	38,48	65,99	65,99



2

Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan meningkatkan Peran dan Fungsi Pengawasan dari eselon III menjadi Inspektorat Utama eselon I yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen organisasi internal.
2. Penataan manajemen SDM dengan parameter proses penerimaan CPNS secara transparan dengan menggunakan system CAT, promosi jabatan terbuka untuk pengisian JPT.
3. Komitmen untuk melaksanakan peembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)



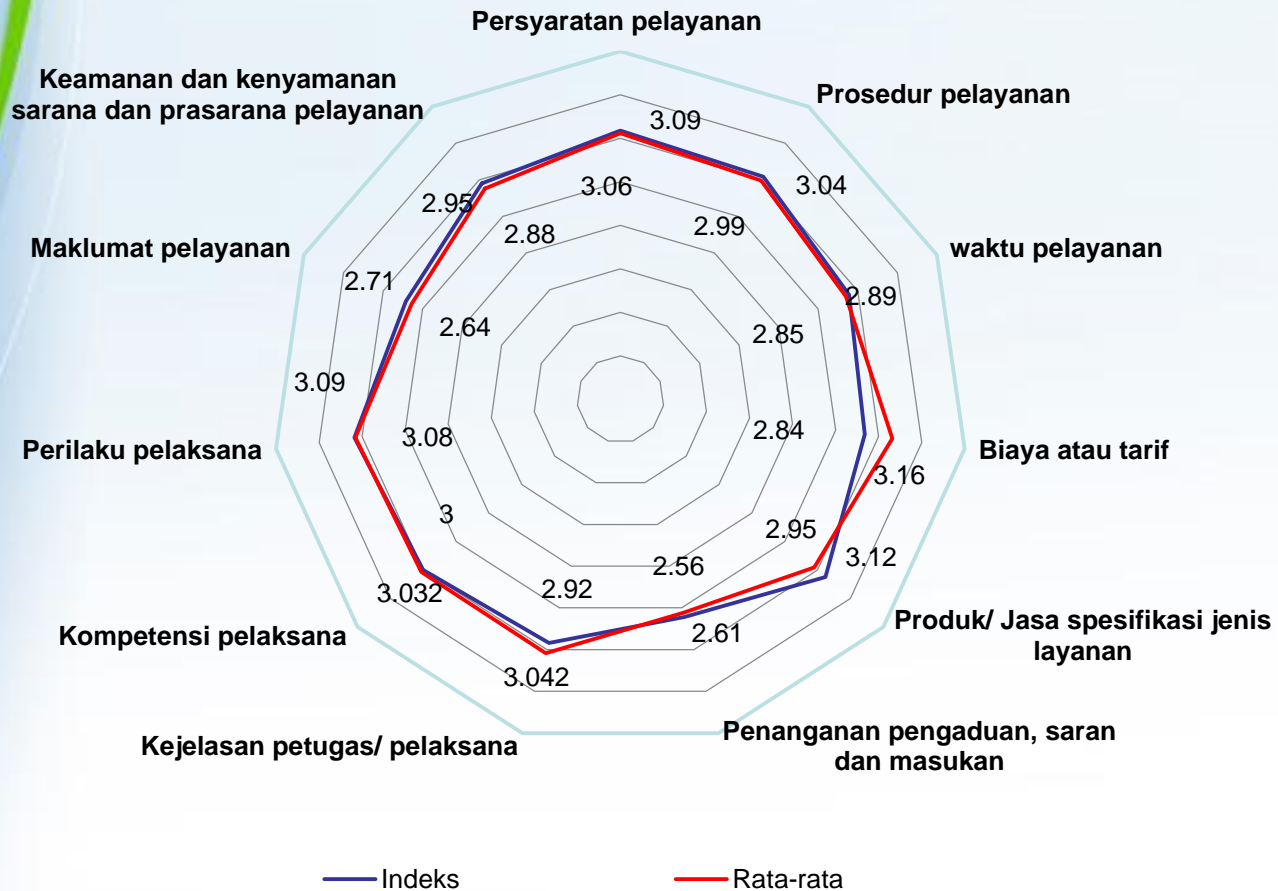
3

Yang harus menjadi Perhatian

1. Tim RB internal belum efektif sehingga belum sepenuhnya mampu mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) menjadi lebih baik.
2. *Agent of Change* atau *Role Model* belum dibentuk secara formal untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan.
3. Belum seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sekretariat Jenderal telah diharmonisasikan
4. SOP yang ada bukan sebagai penjabaran dari peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal
5. *Assesment* pegawai belum secara menyeluruh dilakukan dari segala lapisan kelas jabatan. Sekretariat Jenderal belum melakukan analisis yang mendalam terkait gap kompetensi pegawai sebagai dasar untuk melakukan pembinaan pegawai berkelanjutan
6. Belum seluruh Pimpinan organisasi terlibat secara langsung dan berkelanjutan dalam penyusunan perencanaan kinerja sampai pemantauan pencapaian kinerja secara berkala.



Profil Hasil Survey Pelayanan Sekretariat Jenderal DPR RI





4

Indeks Kualitas Pelayanan Indeks Persepsi Anti Korupsi

IKP

Indeks Kualitas Pelayan



Hasil survey layanan persidangan, layanan kesehatan, dan layanan perpustakaan yang dilakukan melalui purposive random sampling menunjukkan **IKP sebesar 2,92** dari skala 4,00 -> **Belum Menggembirakan.**

Unsur pelayanan biaya atau tariff perlu diperbaiki, karena dibawah rata-rata, sedangkan untuk indeks yang lain perlu dipertahankan dan tetap dilakukan peningkatan agar tidak tertinggal dari K/L lain.

Maklumat Pelayanan agar diperhatikan

IPAK

Indeks Persepsi Anti Korupsi

IPAK Setjen DPR RI **2,85** dari skala 4,00 atau masih berada dibawah rata-rata 28 K/L, yaitu 3,00



5

Penyempurnaan yang harus dilakukan

1. Meningkatkan efektivitas Tim RB Internal
2. Membentuk Agent Of Change atau Role Model secara formal dan memberikan pelatihan intensif untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan.
3. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan untuk pengharmonisan/sinkronisasi atau tumpang tindih.
4. Menetapkan peta proses bisnis sesuai tugas fungsi seluruh unit organisasi, dijabarkan ke SOP
5. Meningkatkan kapasitas pegawai berdasarkan gap kompetensi dan menyusun rencana Pendidikan dan Latihan untuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi berkelanjutan.
6. Meningkatkan keterlibatan seluruh pimpinan organisasi secara langsung dan berkelanjutan, sejak perencanaan kinerja sampai pemantauan pencapaian kinerja secara berkala.
7. Memanfaatkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pengembangan karir individu dan untuk pemberian tunjangan kinerja.
8. Meningkatkan kualitas implementasi Gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan WBS, serta melakukan evaluasi pelaksanaannya
9. Menetapkan unit kerja yang akan dibina dan dikembangkan menuju WBK dan WBBM
10. Menindaklanjuti hasil survey IKP dan IPAK, dan penyempurnaan kualitas pelaksanaan kegiatan pada area pelayanan publik dan pengawasan.
11. Melakukan inovasi terus menerus secara berkesinambungan dalam pelayanan kepada masyarakat.



INSPEKTORAT UTAMA
Sekretariat Jenderal DPR RI